

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026



RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat selesai disusun. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih belum sempurna. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam bekerja dan mengabdikan kepada negara serta masyarakat.

Karanganyar, September 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset Daerah
Kabupaten Karanganyar

DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

Kata Pengantar ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. landasan Hukum I-2

 1.3. Maksud dan Tujuan I-6

 1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ... II-1

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2024
 dan Perkiraan Kinerja Tahun 2025..... II-1

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA II-9

 2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024 II-18

 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 BAPPERIDA II-18

 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 .. II-18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT III-1

 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi..... III-1

 3.2. Tujuan dan Sasaran III-3

 3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III-7

 3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-8

BAB IV RECANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV-1

 4.1. Program dan Kegiatan OPD..... IV-1

 4.2. Dana Indikatif IV-1

 4.3. Sumber Dana yang Dibutuhkan IV-1

BAB V PENUTUP V-1

 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. V-1

 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V-1

 5.3. Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Baperlitbang	II-1
Tabel 2.2	Realisasi APBD di Bapelritbang Tahun 2024 dan 2025 (TW II)	II-4
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-6
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-6
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....	II-6
Tabel 2.6	Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024	II-7
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023	II-8
Tabel 2.8	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD).....	II-9
Tabel 2.9	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)	II-9
Tabel 2.10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2025 Kabupaten Karanganyar ...	II-11
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ...	II-17
Tabel 2.12	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar ..	II-20
Tabel 2.13	Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-26
Tabel 3.1	Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan OPD	III-9
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan dan Sasaran OPD	III-9
Tabel 3.4	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-9
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA tahun 2026	IV-9
Tabel 4.4	Program/Kegiatan BAPPERIDA yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pohon Kinerja Sasaran Daerah : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi	III-12
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Baperlitbang	III-13

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026



RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan merupakan proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan bahkan disahkan dan rencana harus diimplementasikan.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. BAPPERIDA sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi / unit / organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, sebagai berikut:

Maksud :

- 1) Memenuhi Amanat Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang evaluasi dan analisis untuk menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;
- 3) Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;

Tujuan :

- 1) Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah dan pelaporan;
- 3) Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
- 4) Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
- 5) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BAPPERIDA Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPERIDA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang alasan, proses penyusunan, keterkaitan antara dokumen RKPD, Renstra dan Renja BAPPERIDA

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja BAPPERIDA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPPERIDA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPERIDA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN LALU

Pada Bab ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, disusun dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2025

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 di tahun kedua (2026).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama dan Kunci, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPERLITBANG;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPERLITBANG; dan
- 3) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5 Penelaahan usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Masyarakat, hasil Forum Perangkat Daerah (FPD).

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran renja Tahun 2026 yang diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator dan target tahun 2026. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini, Tahap 3: Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk dijadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 BAPPERIDA yang dulunya BAPERLITBANG telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Baperlitbang

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.494.071.583	5.494.071.583	100	6.041.661.912	6.377.661.912	105,56
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.632.300	89.632.300	100	98.500.000	92.450.000	93,86
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	70.632.300	70.632.300	100	79.000.000	72.450.000	91,71
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	100	5.000.000	5.000.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.500.000	100	6.000.000	6.000.000	100,00
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	8.500.000	9.000.000	105,88
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.549.198.223	4.549.198.223	100	5.000.458.162	5.173.885.962	103,47
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.989.723	4.510.989.723	100	4.965.358.162	5.141.035.962	103,54
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.558.500	32.558.500	100	30.500.000	28.250.000	92,62

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000	5.650.000	100	4.600.000	4.600.000	100,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.050.000	3.050.000	100	3.600.000	3.600.000	100,00
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.050.000	3.050.000	100	3.600.000	3.600.000	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.762.500	238.762.500	100	13.000.000	13.000.000	100,00
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.991.500	2.991.500	100	3.000.000	3.000.000	100,00
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.997.000	5.997.000	100	6.000.000	6.000.000	100,00
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.774.000	225.774.000	100	0	0	0,00
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	4.000.000	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.632.560	229.632.560	100	207.397.500	208.656.450	100,61 %
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100	9.500.000	9.240.000	97,26
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.200	11.315.200	100	10.037.500	12.970.250	129,22
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	22.200.000	22.200.000	100	25.000.000	25.000.000	100,00
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.700.000	1.700.000	100	10.000.000	1.670.000	16,70
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100	3.000.000	3.000.000	100,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	12.590.860	12.590.860	100	14.000.000	20.916.200	149,40
19)	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.974.000	18.974.000	100	13.000.000	13.000.000	100,00
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.020.000	135.020.000	100	105.060.000	105.060.000	100,00
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.572.500	6.572.500	100	8.000.000	8.000.000	100,00
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.500.000	10.500.000	100	9.800.000	9.800.000	100,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.275.000	13.275.000	100	326.730.250	421.629.500	129,05
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	250.000.000	310.732.000	124,29
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.275.000	13.275.000	100	45.480.250	70.247.500	154,46
25)	Pengadaan mebel	0	0	0	31.250.000	40.650.000	130,08
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.821.000	158.821.000	100	165.600.000	165.900.000	100,18
26)	Penyediaan jasa surat menyurat	20.301.000	20.301.000	100	21.000.000	21.000.000	100,00
27)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	89.200.000	89.200.000	100	93.600.000	93.600.000	100,00
28)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.320.000	49.320.000	100	51.000.000	51.300.000	100,59
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.700.000	211.700.000	100	226.376.000	298.540.000	131,88
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.030.000	152.030.000	100	128.076.000	134.400.000	104,94
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000	29.170.000	100	28.300.000	32.140.000	113,57
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	30.500.000	100	70.000.000	132.000.000	188,57
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.145.987.500	1.145.987.500	100	860.319.000	1.010.319.000	117,44
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.025.000.000	1.025.000.000	100	740.000.000	890.000.000	120,27
32)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	1.025.000.000	1.025.000.000	100	740.000.000	890.000.000	120,27
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	25.000.000	100	25.319.000	25.319.000	100,00
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	25.000.000	100	25.319.000	25.319.000	100,00
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.987.500	95.987.500	100	95.000.000	95.000.000	100,00
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	20.000.000	100,00
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.987.500	75.987.500	100	75.000.000	75.000.000	100,00
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.635.200.000	1.635.200.000	100	1.395.000.000	1.395.000.000	100,00
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	625.000.000	625.000.000	100	525.000.000	525.000.000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	141.025.000	141.025.000	100	163.177.000	185.937.000	113,95
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	124.200.000	124.200.000	100	138.000.000	129.000.000	93,48
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	142.647.000	142.647.000	100	60.000.000	46.240.000	77,07
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	217.128.000	217.128.000	100	163.823.000	163.823.000	100,00
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	560.200.000	560.200.000	100	420.000.000	420.000.000	100,00
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	77.500.000	77.500.000	100	130.000.000	130.000.000	100,00
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.500.000	59.500.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	423.200.000	423.200.000	100	240.000.000	240.000.000	100,00
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	450.000.000	100	450.000.000	450.000.000	100,00
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000.000	205.000.000	100	180.000.000	180.000.000	100,00
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	40.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000.000	205.000.000	100	220.000.000	220.000.000	100,00
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650.000.000	650.000.000	100	650.000.000	650.000.000	100,00
15.	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
46)	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	600.000.000	600.000.000	100	600.000.000	600.000.000	100,00
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	600.000.000	100	600.000.000	600.000.000	100,00
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan	8.925.259.083	8.925.259.083	100	8.946.980.912	9.432.980.912	105,43

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 105,43%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Baperlitbang terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Baperlitbang yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 9.432.980.912,00 atau 105,43% harus berkurang sebesar Rp. 943.721.000,00 sehingga pagu anggaran Baperlitbang tahun 2025 adalah Rp. 8.489.259.912,00 atau 94,88% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada Pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi keuangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi APBD di Baperlitbang Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD (Pergeseran)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06%	6.303.297.662	3.249..086.912	51,55
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.632.300	73.349.900	81,83%	78.610.000	30.649.350	38,99
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	70.632.300	54.653.900	77,38%	62.381.000	22.683.950	36,36
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.425.000	97,86%	4.000.000	1.324.250	33,11
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.346.000	97,20%	4.750.000	1.000.000	21,05
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.925.000	99,25%	7.479.000	5.641.150	75,43
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.549.198.223	4.372.772.285	96,12%	5.172.003.462	2.458.560.925	47,54
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.989.723	4.334.666.285	96,09%	5.141.035.962	2.448.560.925	47,63
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.558.500	32.556.000	99,99%	26.367.500	8.000.000	30,34
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang an Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000	5.550.000	98,23%	4.600.000	2.000.000	43,48
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.050.000	2.950.000	96,72%	2.850.000	1.100.000	38,6
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.050.000	2.950.000	96,72%	2.850.000	1.100.000	38,6
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.762.500	235.771.000	98,75%	11.021.000	2.250.000	20,42
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.991.500	2.941.500	98,33%	2.989.000	0	0,00
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.997.000	4.997.000	83,32%	4.800.000	0	0,00
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	225.774.000	224.069.000	99,24%	0	0	47,4
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.763.500	94,09%	3.232.000	2.250.000	69,62
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.632.560	214.907.312	93,59%	140.779.700	66.726.195	47,40
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.981.250	99,77%	7.017.000	3.322.750	47,35
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.200	11.115.980	98,24%	9.500.250	78.625.000	82,76
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	22.200.000	21.966.000	98,95%	23.100.000	3.485.000	6,97
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.700.000	1.683.200	99,01%	1.001.250	0	0,00
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100,00%	3.000.000	750.000	25,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	12.590.860	12.573.160	99,86%	20.384.700	4.375.000	21,46
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.974.000	18.755.000	98,85%	10.400.000	350.000	3,37
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.020.000	121.347.772	89,87%	51.676.500	40.630.945	78,63
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.572.500	6.465.000	98,36%	6.300.000	3.700.000	58,73
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.500.000	10.259.950	97,71%	8.400.000	2.250.000	26,79
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.275.000	12.950.000	97,55%	421.629.500	405.745.000	96,23
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	310.732.000	295600000	95,13
24)	Pengadaan Mebel	0	0	0	40.650.000	40.245.000	99,00
25)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.275.000	12.950.000	97,55%	70.247.500	69.900.000	99,51
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.821.000	154.254.854	97,12%	165.900.000	75.652.442	45,6
26)	Penyediaan jasa surat menyurat	20.301.000	20.299.500	99,99%	21.000.000	9.600.000	45,71
27)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	89.200.000	84.635.354	94,88%	93.600.000	45.052.442	48,13
28)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.320.000	49.320.000	100,00%	51.300.000	21.000.000	40,94
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.700.000	210.895.150	99,62%	310.504.000	208.403.000	67,12

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD (Pergeseran)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.030.000	151.830.150	99,87%	146.364.000	68.202.000	46,6
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000	28.965.000	99,30%	32.140.000	9.795.000	30,48
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	30.100.000	98,69%	132.000.000	130.406.000	98,79
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98%	656.701.600	262.221.839	39,93
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	549.532.600	2.493.996.399	43,39
32)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	549.532.600	249.399.639	43,39
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	25.319.000	5.984.100	23,63
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	25.319.000	5.984.100	23,63
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.987.500	94.081.370	98,01%	81.850.000	6.838.100	8,35
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	19.969.630	99,85%	20.000.000	293.400	1,47
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.987.500	74.111.740	97,53%	61.850.000	6.544.700	10,58
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02%	989.037.700	278166825	28,12
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	625.000.000	617.467.610	98,79%	389.621.400	109.546.350	28,12
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	141.025.000	138.856.260	98,46%	177.086.300	20.056.700	11,33
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	124.200.000	122.762.900	98,84%	78.379.900	68.214.650	87,03
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	142.647.000	141.998.100	99,55%	22.849.950	4.303.300	18,83
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	217.128.000	213.850.350	98,49%	111.305.250	16.971.700	15,25
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	560.200.000	556.507.597	99,34%	276.597.000	75.833.300	27,42
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	77.500.000	76.824.090	99,13%	117.890.200	67.723.700	57,45
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.500.000	59.338.649	99,73%	23.860.200	1.782.500	7,47
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	423.200.000	420.344.858	99,33%	134.846.600	6.327.100	4,69
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	445.222.313	98,94%	322.819.300	92.787.175	28,74
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000.000	203.628.440	99,33%	114.765.000	79.803.550	69,54
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	38.863.700	97,16%	25.753.300	1.517.800	5,89
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000.000	202.730.173	98,89%	182.301.000	11.465.825	6,29
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650.000.000	600.793.098	92,43%	540.222.950	231.849.650	42,92
15.	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	18.446.750	0	0,00
46)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	18.446.750	0	0,00
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	600.000.000	559.208.198	93,20%	521.776.200	231.849.650	44,43
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	559.208.198	93,20%	521.776.200	231.849.650	44,43
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan	8.925.259.083	8.609.257.769	96,46%	8.489.259.912	4.021.325.226	47,37

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 8.925.259.083,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 8.609.257.769,00 atau 96,46 %. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 4.021.325.226,00 atau 47,37% dari pagu efisiensi anggaran Rp. 8.489.259.912,00.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.449.566.698	5.147.657.923	94,46	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.108.000.000	1.091.174.751	98,48	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.545.000.000	1.534.175.876	99,30	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	625.849.000	619.605.656	99,00	650.000.000	600.793.098	92,43
	Persentase realisasi	8.728.415.698	8.392.614.206	96,15	8.925.259.083	8.609.257.769	96,46
	Rata-rata realisasi 4 program			97,81			96,12

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Serapan anggaran selama ini belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut BAPERLITBANG perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja Baperlitbang dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP (Daerah)	Nilai	72	71,90	96,29%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek	Baik	Baik	100%
3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indek	Inovatif	Inovatif	100%
	Rata-rata					98,76

Sumber : Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel 2.5 kinerja Baperlitbang tahun 2024 masuk kriteria sangat tinggi (98,76%) dari 3 indikator sasaran terdapat 1 yang tidak tercapai 100% yaitu:

(1) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP): 79,90 dengan kinerja 96,29 dikarenakan :

- Kualitas Perencanaan Kinerja belum memadai.
Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, penetapan target belum cukup menantang namun realistis, serta keterpaduan *cascading* kinerja antar level jabatan belum tergambar utuh dalam dokumen perencanaan.
- Sistem Pengukuran dan Pemantauan Kinerja belum terstandar.
Mekanisme pengumpulan data kinerja belum terdokumentasi secara jelas dan seragam; pemantauan berjenjang atas capaian unit di bawahnya belum konsisten; pemahaman pegawai atas hasil pengukuran masih terbatas; serta hasil pengukuran belum secara memadai menjadi dasar penyesuaian alokasi anggaran.
- Siklus Akuntabilitas belum optimal (Pelaporan dan Evaluasi Internal).
Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis perbandingan (*benchmarking*) yang memadai dan belum efektif mendorong penguatan budaya kinerja; evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan hasilnya belum dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan kinerja.

Sedangkan untuk capaian program di Baperlitbang tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	75*)	75
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	%	93	98,97	106,42
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	%	52	57	109,6
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	50	53	106
	Rata-rata kinerja program					99,40

Sumber : Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Keterangan :

- *) Realisasi dari 8 indikator (2 indikator sasaran dan 5 indikator program)
Dimana terdapat 2 indikator yang tidak tercapai yaitu :
1. Nilai SAKIP Daerah dan Nilai SAKIP Baperlitbang;
 2. Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh Baperlitbang dengan persentase mencapai 99,40% dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Baik. Ada catatan nilai Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tidak tercapai targetnya, tidak dapat tercapai adalah karena yang dicantumkan dalam indikator sasaran adalah nilai SAKIP Daerah, yang pencapaiannya sangat tergantung dari dokumen yang dikerjakan semua OPD. Penyebab

kedua adalah adanya nilai IPKD tahun 2024 yang aplikasi penilaiannya seringkali mengalami gangguan (inputing hilang / terreset / salah input data tahun yang diminta).

b. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja BAPERLITBANG lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2023	Kinerja 2024	Ket
1	2	3	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	78,93%	96,29%	naik
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPd	%	100,00%		Berbeda (tdk dapat dibandingkan)
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPd	%	100,00%		
Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai		100%	
1.2. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPd	%	108,08%		
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	103,64%		
1.3. Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	114,00%		
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	150,00%		
Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai		100%	
Kinerja Baperlitbang			107,81	98,76	Berbeda (tdk dapat dibandingkan)

Sumber Baperlitbang, 2025, diolah

Berdasarkan Tabel 2.7 tersebut kinerja BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah Sangat tinggi dimana capaian target indikator rata-rata mencapai 98,76%, jika dibanding dengan tahun 2023 yang 107,81% (Sangat tinggi) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 9,05%. Namun hal ini tidak dapat dibandingkan karena indikator yang digunakan berbeda antara tahun 2024 dengan 2023. Perbedaan ini disebabkan karena dasar penyusunan Renstra dan Renja berbeda, tahun 2023 menggunakan dasar RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan tahun 2024 menggunakan RPD Tahun 2024-2026.

c. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terakhir (tahun 2026) Renstra BAPERLITBANG atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran

mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2024	2026	
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,90	75	Belum tercapai
2.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2025

Tabel 2.9.
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Program	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2024	2026	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	75	100	Tidak Tercapai
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	Tercapai
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	98,97	95	Tercapai
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	57	56	Tercapai
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	53	52	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2025

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9, diketahui bahwa kinerja Organisasi BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah sebagian besar sudah tercapai meskipun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Baperlitbang adalah pemberian fasilitasi, pendampingan OPD berbasis perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang meliputi :

- 1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
- 2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA);
- 3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANG, Forum OPD /FORGAB OPD);
- 4. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar Pemkab (Musrenbangwil, Musrenbangprov, Musrenbangnas, Musrenbangkab tetangga dll).

5. Menyiapkan / memfasilitasi / mengkoordinasikan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi dan transparan;
6. Memberikan / menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan dan hasil evaluasinya.
7. Layanan perijinan KKN, PKL / Magang Mahasiswa/Pelajar;
8. Melakukan riset, kajian dan kegiatan penelitian lainnya.
9. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kreativitas dan inovasi daerah.

Upaya Baperlitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 8 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum BAPERLITBANG dan Forum Gabungan (forgab) Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Baperlitbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Baperlitbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2025
Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
1					URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	01				BIDANG URUSAN PERENCANAAN									
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	100%	100%	75,00%	75,00	100%	100%	100%
01	2	01			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, enganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 Dokumen	3 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
01	2	01		04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
01	2	01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
01	2	01		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	02			Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
01	2	02		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01	2	02		07		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	03		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	05			Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	05		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
01	2	05		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	05		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
01	2	06			Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	06		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baca an dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01	2	06		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan	12 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	06		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi			100%	100%	50%	100%	100%	100%
01	2	07		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2 unit	-	0%	2 unit	1 unit	50%
01	2	07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	8 unit	4 unit	100%	8 unit	29 unit	362%
01	2	07		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	-	-	-	-	-
01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	09		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	09		06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01		07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPd)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
02	2	02			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan Pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	02		01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	43 masukan	43 masukan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
02	2	03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
02	2	03		01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
02	2	03		03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03					PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	100%	100%	93%	98,97%	106,4 %	94%	94%	100%
03	2	01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	01		03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
03	2	01		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	1 ldokumen	1 ldokumen	7 ldokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	01		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 OPD	13 OPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
03	2	01		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03	2	02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	02		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	02		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
03	2	02		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03	2	03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
03	2	03		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	03		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Fisik dan Prasarana	5 OPD	5 OPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
03	2	03		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
2					BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
02	01				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	54%	54%	52%	57%	109,6 %	54%	54%	100%
						Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	76%	76%	50%	53%	106%	51%	51%	100%
02	2	01			Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	54%	54%	57%	71%	124,6 %	60%	60%	100%
02	2	01		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
02	2	04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	76%	76%	78%	80%	102,6 %	79%	79%	100%
02	2	04		01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	8 dokumen	8 dokumen	57 dokumen	75 dokumen	131,6 %	59 dokumen	59 dokumen	100%

Tabel 2.11.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2023 (thn-2)	2024 (thn-1)	2025 (thn-n)	2026 (thn+1)	2024 (thn-2)	2025 (thn-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14
1.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	100,00	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	-	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	-	Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	90,00	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase realisasi capaian RPJMD	-	Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD	88,00	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	-	Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	50,00	52,00	54,00	56,00	57,00		
6.	Persentase inovasi yang diimplementasikan	-	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00		
7	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	Membandingkan jumlah OPD yang tercapai indikator IKU dan IKK dengan jumlah total OPD		100,00	100,00	100,00	75,00		
8	Komponen Perencanaan dalam SAKIP	-	Hasil Review SAKIP oleh Inspektorat		74,00	75,00	76,00	71,90		
9	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	-	Membandingkan program, kegiatan, subkegiatan antara APBD PD apakah sudah selaras dengan RKPD		93,00	94,00	95,00	98,97		
10	Indeks inovasi daerah	-			inovatif	inovatif	inovatif	inovatif		

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024

Pencapaian prestasi yang bersifat perlombaan yang diikuti oleh BAPERLITBANG baik sebagai peserta ataupun sebagai fasilitator peserta, pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Juara II Krenova Kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN
Lomba kreativitas dan inovasi kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Surakarta, dimana Wakil dari Kabupaten Karanganyar yang difasilitasi oleh BAPERLITBANG dengan inovasi berupa : KARANGANYAR AMBEC (al amaanah best electrical controller);
- 2) Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

- 1) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan : terkait penyusunan RPJMD 2025-2029; Penyusunan RKPD dan Perubahannya; Efisiensi anggaran; Sinergitas Pusat dan Daerah dll
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan secara sistematis dan akurat : Penyediaan dan pemanfaatan satu data dalam SIPD;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah : pembuatan dan penempatan indikator yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena kurang atau tidak ada bukti dukungannya;

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

- 1) Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
- 2) Adanya anggapan buruk terhadap proses perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
- 3) Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Baperlitbang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Penyusunan Renja dan RKPD Tahun 2026, pada tahapan Rancangan awal masih menggunakan RPD dan Renstra Tahun 2024-2026, tetapi pada tahapan berikutnya akan disesuaikan dengan Rancangan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.

Dilihat dari kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan antara renja dengan Rancangan Awal RKPD 2026 maka, diketahui Renja BAPPERIDA Tahun 2026 sudah sinkron / konsisten.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPERIDA disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.432.980.912	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.811.933.412	
	PERENCANAAN				8.782.980.912	PERENCANAAN				9.161.933.412	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.377.661.912	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.426.614.412	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	92.450.000	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	100%	92.450.000	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	72.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	72.450.000	
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	
1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000.000	
2.	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	5.173.885.962	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	5.173.885.962	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	5.141.035.962	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	5.141.035.962	
2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.250.000	
2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	100%	3.600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	100%	3.600.000	
3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	13.000.000	Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	167.000.000	
4.1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.000.000	
4.2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	
4.3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	150.000.000	
4.4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	208.656.450	Administratif Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	100%	214.856.450	
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumleah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	1 Paket	9.240.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumleah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	1 Paket	9.240.000	
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perleng kapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.970.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.970.250	
5.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
5.4.	Penyediaan Barang Cetak an dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1.670.000	Penyediaan Barang Cetak an dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1.670.000	
5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	3.000.000	
5.6.	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.916.200	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.916.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000	
5.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060.000	
5.9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	
5.10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	9.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	100%	421.629.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	100%	441.382.000	
6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	310.732.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	310.732.000	
6.2.	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah Mebel yang Disediakan	15 unit	40.650.000	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah Mebel yang Disediakan	15 unit	40.650.000	
6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	70.247.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	90.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	165.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	165.900.000	
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000.000	
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600.000	
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.300.000	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	298.540.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	216.540.000	
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	134.400.000	Penyediaan Jasa Pemelihara raan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	134.400.000	
8.2.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140.000	
8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	132.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.010.319.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALU ASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	1.010.319.000	
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	890.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	890.000.000	
9.1.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000.000	
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perenanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25.319.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perenanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	25.319.000	
10.1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	25.319.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	25.319.000	
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	95.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	95.000.000	
11.1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	20.000.000	
11.2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	
III.	PROGRAM KOOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	94%	1.395.000.000	PROGRAM KOOORDINASI dan SINKRONISASI PEREN CANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	94%	1.395.000.000	
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	525.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	565.000.000	
12.1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	185.937.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	185.937.000	
12.2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	129.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	129.000.000	
12.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	46.240.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	86.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	163.823.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	163.823.000	
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	420.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	480.000.000	
13.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000.000	Koordinasi Penyusunan Doku men Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Perecono mian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000.000	
13.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pereko nomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan engembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Laporan	50.000.000	
13.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	240.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	300.000.000	
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	450.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	510.000.000	
14.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	180.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	180.000.000	
14.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Laporan	50.000.000	
14.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	220.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	300.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			650.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			650.000.000	
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	56%	650.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Karanganyar	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	56%	650.000.000	
			Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	52%				Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	52%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Karanganyar	Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	62%	50.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	62%	50.000.000	
15.1.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	50.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	50.000.000	
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	80%	600.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	80%	600.000.000	
16.1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	60 dokumen	600.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	60 dokumen	600.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPERLITBANG sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi *leading sector* atau coordinator pada urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan

Usulan program dalam Renja BAPERLITBANG dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.13.

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sinkron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah **“Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Revisi dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah satu pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas,

berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
- 2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkeadilan dan adil;
- 3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatnya riset dan inovasi;
- 6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;

9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastruktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja BAPPERIDA Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029, adalah ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.***

Penjelasan rumusan tujuan BAPPERIDA tersebut diatas adalah dengan adanya peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang melayani, melalui:

- 1) Meningkatkan dokumen perencanaan yang sinergi antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan antara Daerah dan Perangkat Daerah (antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja);
- 2) Meningkatkan kesesuaian antara prioritas pusat, provinsi dan daerah;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong perencanaan yang baik;
- 4) Meningkatkan riset dan inovasi daerah, serta pemanfaatannya;

- 5) Meningkatnya akuntabilitas dan pencapaian sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelayanan Masyarakat;
- 6) Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat / umum yang bermutu baik (berkualitas) sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran BAPPERIDA Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah;

Penjelasan rumusan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah — Bapperida menyusun rencana pembangunan yang rapi dan sejalan antar dinas, agar langkah semua pihak satu arah. Keberhasilan terlihat dari rencana selesai tepat waktu, isinya nyambung, dan program prioritas bisa jalan tanpa hambatan. Strategi meliputi pendampingan ke OPD, forum sinkronisasi yang rutin, serta penggunaan data yang jelas saat mengambil keputusan. Pengendalian dilakukan lewat pemantauan berkala dan pengecekan dokumen, lengkap dengan notulen dan daftar cek.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah — Bapperida memberi layanan pendampingan perencanaan dan data yang mudah diakses, responsif, dan ramah pengguna. Capaian diukur dari kepuasan penerima layanan, kecepatan penyelesaian, dan kerapian administrasi yang terjaga. Strategi mencakup penyederhanaan alur, layanan daring yang praktis, dan peningkatan keterampilan pegawai. Pengendalian dilakukan dengan survei singkat, dashboard pemantauan, dan tindak lanjut perbaikan yang konsisten.
3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah — Bapperida fokus pada riset yang bisa langsung dipakai dalam kebijakan dan pada inovasi yang manfaatnya terasa bagi warga. Keberhasilan terlihat dari saran riset yang dipakai, data yang rapi dan mudah diakses, serta makin banyak ide baru yang diterapkan. Strategi meliputi memilih topik paling penting, kerja sama dengan kampus, pelaku usaha, dan komunitas, serta pendampingan agar ide siap diuji coba. Tata kelola dilakukan dengan seleksi yang jelas, jadwal tindak lanjut yang dipantau, dan rilis singkat yang menjelaskan hasil dan manfaatnya

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2026
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi			IPP: Indek perencanaan pembangunan	Indeks	85,11
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,25
	1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	1) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Indeks	24,25
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,75
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100
		2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	%	40
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target -	%	40

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2026
			Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA		
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	40
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,2
		3) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00
	3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah		Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset	Buah	4
			Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri	Buah	45
		4) Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	Prosen	34

Sumber : Renstra BAPPERIDA 2025-2029

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

BAPPERIDA sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pad urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan seperti BAPPERIDA harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

- 1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, BAPPERIDA memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
- 2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, BAPPERIDA dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
- 3) Adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. BAPPERIDA harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
- 4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
- 5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaaa ruang dll.
- 6) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan BAPPERIDA juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.
7. Selain itu, BAPPERIDA dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara BAPPERIDA mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran BAPPERIDA dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan BAPPERIDA.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka BAPPERIDA masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan OPD

Tujuan RPJMD	Indikator	Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi birokrasi	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indeks pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan dan Sasaran OPD

Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indek pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP
				2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	3. Meningkatkan Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	1. Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset
					2. Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	1) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
2.Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administratif Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Fasilitas Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	4) Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
		Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan OPD

Beberapa program kegiatan dan subkegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program, kegiatan dan subkegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program kegiatan dan subkegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPERIDA Tahun 2026 adalah sebagaimana tabal 4.1

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2026

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN								5.448.765.175					10.632.550.000
5.01	PERENCANAAN								5.148.765.175					9.832.550.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	%	75	71,90	73	73	4.571.765.175	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	6.119.300.000
5.01.01.201		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	29.100.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	134.000.000
5.01.01.201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokum en	2	2	2	4	12.520.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	110.000.000
5.01.01.201.04		Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	4	4	4							
5.01.01.201.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	2	3	3	1	8.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	12.000.000
5.01.01.201.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	4	4	4	4	8.580.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	12.000.000
5.01.01.202		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	4.046.215.295	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	4.509.300.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	31	31	37	3.981.215.295	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	37	4.500.000.000
5.01.01.202.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1							
5.01.01.202.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	65.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	9.300.000
5.01.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	%	100	100	100							
5.01.01.203.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Laporan	1	1	1							
5.01.01.205		Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	%	100	100	100	100	5.049.880	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	169.500.000
5.01.01.205.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1							
5.01.01.205.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	5.049.880	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	14.500.000
5.01.01.205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	31	31	31	0	0	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	37	155.000.000
5.01.01.205.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31	31	31							
5.01.01.206		Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	100	100	100	144.900.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	239.500.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Lapora n	1	1	1							
5.01.01.206.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lapora n	1	1	1	1	22.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	18.500.000
5.01.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Lapora n	1	1	1	1	17.300.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	19.000.000
5.01.01.206.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lapora n	1	1	1							
5.01.01.206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokum en	2	2	2							
5.01.01.206.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan/Material yang disediakan	Lapora n	1	1	1							
5.01.01.206.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	1	1	1	1	15.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	23.500.000
5.01.01.206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	1	1	1	1	75.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	135.000.000
5.01.01.206.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	1	1	1	1	10.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	13.500.000
5.01.01.206.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokum en	1	1	1	1	5.100.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	30.000.000
5.01.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	%	100	100	100	100	15.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	520.000.000
5.01.01.207.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	2	0	1	0	0	Kab. Karang	APBD	OPD	0	370.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							anyar				
5.01.01.207.03		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit		1	1							
5.01.01.207.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	4	28	1	15.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	10	150.000.000
5.01.01.207.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0		-	0	Kab. Karang anyar	APBD	OPD		
5.01.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	207.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	185.000.000
5.01.01.208.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1							
5.01.01.208.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	120.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	125.000.000
5.01.01.208.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	87.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	60.000.000
5.01.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	124.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	362.000.000
5.01.01.209.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	22	22	91.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	22	204.000.000
5.01.01.209.06		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	50	13.000.000,	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	50	55.000.000
5.01.01.209.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	20.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	103.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100							
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD					90,75	510.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD		1.085.000.000
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD					100		Kab. Karang anyar	APBD	OPD		
5.01.02.201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	378.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	950.000.000
5.01.02.201.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	3	4	378.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	950.000.000
5.01.02.202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	20.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	20.000.000
5.01.02.202.01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	20.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	20.000.000
5.01.02.203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	112.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	115.000.000
5.01.02.203.01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	4	4	20.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	20.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.02.203.03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lapora n	2	2	2	2	92.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	2	95.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	%	95	98,97	98	100	670.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	
				Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	%				40		Kab. Karang anyar	APBD	OPD	40,5	2.628.250.000
				Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	%				40		Kab. Karang anyar	APBD	OPD	40,5	
				Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan					40		Kab. Karang anyar	APBD	OPD	40,5	
5.01.03.201			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100	100	300.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	847.000.000
5.01.03.201.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lapora n	3	3	3	3	80.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	3	209.000.000
5.01.03.201.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokum en	4	7	5	4	84.225.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	184.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		RKPD)												
5.01.03.201.07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	4	1	36.475.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	121.000.000
5.01.03.201.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	2	1	99.300.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	333.000.000
5.01.03.202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	175.260.800	Kab. Karang anyar	APBD	OPD		815.000.000
5.01.03.202.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	7	5	4	59.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	240.000.000
5.01.03.202.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	4	4	1	17.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	125.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.202.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lapora n	2	2	2	1	98.260.8000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	450.000.000
5.01.03.203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	100	100	100	100	194.739.200	Kab. Karang anyar	APBD	OPD		966.250.000
5.01.03.203.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokum en	4	7	4	4	95.363.700	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	4	330.000.000
5.01.03.203.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perang kat Daerah	4	4	4	1	23.000.00	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	180.000.000
5.01.03.203.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lapora n	2	2	2	1	76.375.500	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	456.250.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								300.000.000					800.000.000
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	56	57	54							
			Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	52	53	51							

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02.201		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	%	62	62	60							
5.05.02.201.12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Lapora n	9	9	8							
5.05.02.204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	%	80	80	79							
5.05.02.204.01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokum en	60	90	59							
5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah		Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%				34	300.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	35	600.000.000
5.05.03.2.01		Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase rencana riset yang dilaksanakan (didanai)	%				10	50.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	15	100.000.000
5.05.03.2.01.0003		Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Lapora n				4	50.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	6	100.000.000
5.05.03.2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase invensi dan inovasi yang difasilitasi pengembangannya	%				60	250.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	62	500.000.000
5.05.03.2.02.0012		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Lapora n				1	202.684.750	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	400.000.000
5.05.03.2.02.0021		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Lapora n				1	47.315.250	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	100.000.000

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget 2026
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	85,11
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,25
3	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP	Nilai	24,25
4	Nilai SKM	Nilai	88,5

Tabel 4.3
Program/Kegiatan BAPPERIDA yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaen Karanganyar Tahun 2026	Program/Kegiatan BAPPERIDA yang mendukung	Pagu Anggaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan	29.100.000
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	➤ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan Daerah ➤ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➤ Program Riset dan Inovasi Daerah	510.000.000 670.000.000 300.000.000
		Jumlah	1.509.100.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Menjadi bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan, yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya (*cascading*) dan juga dapat mempengaruhi (*cross cutting*) capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya. Untuk itulah penyusunan renja harus memperhatikan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagai *leading* / koordinator dalam penyusunan dokumen Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja BAPPERIDA Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;
- 3) Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja BAPPERIDA Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;

- 2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu:
 - a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan ;
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan dilaksanakannya Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPERLITBANG	

